



**Bappeda
Provinsi Papua**

BULETIN

Tahun 2022



**YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si
KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA**



#Edisi 4 Tahun 2022



bappeda.papua.go.id



[bappedapapua](https://www.instagram.com/bappedapapua)



[Bappeda Provinsi Papua](https://www.youtube.com/BappedaProvinsiPapua)

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaan-Nya sehingga Buletin Bappeda Provinsi Papua Edisi 4 Tahun 2022 dapat disusun dan diterbitkan. Pada edisi ini, akan disajikan informasi terkait aktifitas Bappeda Provinsi Papua sepanjang tahun 2022.

Kesuksesan Bappeda Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang tergambar pada berbagai aktifitasnya merupakan bukti bahwa Bappeda Provinsi Papua turut memberikan kontribusi dalam mengawal visi Provinsi Papua "Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera Yang Berkeadilan" sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Kami senantiasa menyambut baik semua masukan dan saran untuk perbaikan mutu buletin ini di waktu mendatang. Akhirnya, semoga buletin ini dapat bermanfaat. Selamat membaca!

Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin, red.

DAFTAR ISI

1	Musrenbangda & Musrenbang Otsus Provinsi Papua Tahun 2021
3	Inovasi Daerah: Pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5	Rencana Aksi Daerah Pangan & Gizi (RAD-PG) Provinsi Papua
6	RAKOR Papua Integrasi Satu Data (PAITUA) Provinsi Papua
8	Pelaksanaan monitoring & evaluasi pembangunan daerah Provinsi Papua 2022
10	Kampung Mandiri Pangan: Percepatan & Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditi Lokal
12	Workshop Perencanaan Sumber Daya Air
14	Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua
15	Selamat Datang Tiga Provinsi Baru Tanah Papua
19	Serba-Serbi Kegiatan Bappeda Provinsi Papua 2021

REDAKSI

Penanggung Jawab

Yohanes Walilo, S.Sos.,M.Si

Pimpinan Redaksi

Verra A.P Wanda, ST., M.Si

Sekretaris Redaksi

Andry, SIP, M.Si

Redaktur Pelaksana

Robeka P. Mansnandifu, S.Sos., MM

Merlina Hamadi, SE., MM

Hariman Darif, S.Pi., MT

Najib Suaery, SE., MM

Dr. Bintang Yuliana, SE., MM

Peliput Berita

Novita Hana Mramra, SE

Mikha Bukorpioper

Syaiful Musaad

Editor

Novi Agaki, S.S

Layout & Desain Buletin

Indra Rukmana, S.Kom

Administrasi

Yune Natalia Yonathan, SE

Elisabeth S. Lumingkewas



Bappeda
Provinsi Papua

Keluarga Besar

BAPPEDA PROVINSI PAPUA

Mengucapkan

Selamat Natal 2022 & Tahun Baru 2023

“Natal adalah momen perayaan terbaik untuk memulai tahun baru penuh makna”



Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si
Kepala Bappeda Provinsi Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

MUSRENBANGDA DAN MUSRENBANG OTSUS PROVINSI PAPUA TAHUN 2022

Jayapura - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Papua dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Provinsi Papua dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 telah dilaksanakan pada Selasa, (19/4/22), bertempat di Hotel Horizon Ultima Entrop Jayapura dan dibuka secara resmi oleh Plt. Asisten III Bidang Umum Setda Provinsi Papua, Derek Hegemur, mewakili Gubernur Papua. Dalam sambutannya, Hegemur menyatakan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2023 merupakan tahapan yang sangat penting dan strategis dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini menjadi penting dan strategis karena, pertama, harus bisa memastikan pencapaian semua sasaran dalam RPJMD Provinsi Papua 2019-2023; kedua, tahun 2023 adalah awal pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) sebagai dokumen acuan bersama seluruh level pembangunan Provinsi Papua; ketiga, tahun 2023 adalah awal implementasi regulasi baru pengelolaan dana Otonomi Khusus, yang merupakan sumber dana utama pembiayaan pembangunan di Provinsi Papua; keempat, RKPD Tahun 2023 harus bersinergi dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan keberhasilan Major Project Nasional tahun 2023 di Provinsi Papua. Selain itu, mencermati dinamika pembangunan yang kompleks sebagai dampak dari globalisasi dan adaptasi dalam kehidupan new normal akibat pandemi Covid-19 maka diperlukan kolaborasi dan inovasi pemikiran yang positif dalam membangun konsep dan strategi. Dengan pembangunan yang terpadu, terintegrasi, dan bersinergi dengan semua stakeholder pembangunan maka akan dapat

mengakomodir perencanaan pembangunan yang diusulkan, baik secara *topdown planning* maupun *bottomup planning*. Lebih jauh, Hegemur meminta kepada Bupati dan Walikota untuk mengkoordinasikan seluruh jajarannya dalam mendukung upaya mensinergikan pembangunan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, pada kesempatan yang sama menyatakan pelaksanaan Musrenbangda ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 karena pelaksanaannya bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dari target-target capaian rencana pembangunan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang secara berjenjang dengan tetap mengacu pada program APBN atau RPJM pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.



Kepala Bappeda Provinsi Papua, **Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si**

Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

Selain itu, Walilo juga mengatakan bahwa terkait dengan aspek kebijakan perubahan Otsus pada Undang-undang Otsus yang lebih berbicara tentang masyarakat serta rumusan konsistensi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat, memberikan afirmasi, serta melindungi hak dasar Orang Asli Papua maka tema RKPD Provinsi Papua yaitu memastikan terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan telah sesuai dengan visi misi Gubernur Papua.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Papua, Adolof Kambuaya, pada kesempatan wawancara pada kegiatan yang sama menyatakan bahwa dalam Musrenbangda dan Musrenbangsus ini dihadirkan perwakilan dari pusat, baik dari Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemendagri untuk menyampaikan kebijakan pusat. Dalam diskusi tersebut akan diperoleh masukan dan pokok-pokok pikiran dari *stakeholders* yang bergerak di semua sektor. Selanjutnya, setelah Musrenbangda selesai dilaksanakan maka RKPD dapat diproses dan disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi dasar pada penyusunan rancangan APBD. Selanjutnya, Kambuaya juga menjelaskan bahwa

Musrenbangda perlu dilakukan sehingga dapat diketahui sumber pendanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, dapat dipilih program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah maupun nasional yang saling beririsan.

Hadir pada kegiatan Musrenbangda dan Musrenbang Otsus ini, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik dan Staf Ahli Menteri PPN/ Bappenas Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Velix Wanggai. Selain itu, diikuti pula oleh peserta perwakilan dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, SKPD Provinsi Papua, TNI, Polri, dan juga instansi vertikal.



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

INOVASI DAERAH: PEMBAHARUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

Inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini perlu dilaksanakan karena sasaran dari inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan juga peningkatan daya saing daerah. Adapun bentuk dari inovasi daerah berupa inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi kebijakan publik, dan juga inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk Provinsi Papua, telah dilakukan sosialisasi terkait inovasi daerah kepada semua SKPD sehingga diharapkan SKPD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara yang inovatif. Semua inovasi yang dilakukan oleh SKPD dapat

disesuaikan dengan urusannya dan harus dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kepala Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bappeda Provinsi Papua, Nur Alam, menjelaskan bahwa, dibutuhkan pemahaman terkait inovasi daerah oleh semua SKPD sehingga dapat bekerja dengan sistem kerja yang inovatif. Hal ini menjadi penting karena walaupun telah dilaksanakan sosialisasi terkait inovasi daerah namun belum semua SKPD yang melaksanakan dan melaporkannya.

Alam juga menjelaskan, untuk Provinsi Papua telah didaftarkan 12 (dua belas) inovasi daerah. Untuk urusan perencanaan dan penganggaran terdapat 6 (enam) inovasi daerah yang telah didaftarkan, yaitu Papua Pu Rencana, Papua Pu Anggaran, Papua Pu Musrenbang, Papua Integrasi Satu Data (PAITUA), Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU), dan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Lima Wilayah Adat Provinsi Papua. Untuk urusan sosial terdapat 2 (dua) inovasi daerah yang telah didaftarkan, yaitu Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua (Gerbangmas Hasrat Papua) dan Bangun Generasi Emas dan Keluarga Papua yang Sejahtera (Bangga Papua). Untuk urusan komunikasi dan informatika terdapat 2 (dua) inovasi daerah yang telah didaftarkan, yaitu Sistem Presensi dan TPP, Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pemerintah Provinsi Papua. Selain itu, telah didaftarkan juga inovasi daerah lainnya, yaitu Papua Perizinan Online dan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP).

Selanjutnya, bertempat di Hotel Swisbell Jayapura (25/5/22), telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah Tematik Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Provinsi Papua, Verra Wanda, yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Papua. Dalam sambutannya, Wanda menyampaikan antusias dan apresiasi pemerintah atas upaya meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait upaya menciptakan inovasi daerah sebagai wujud nyata meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah, baik dalam inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang lebih kreatif dan inovatif. Lebih jauh, Wanda berharap agar peserta Bimtek diajak untuk berlatih dalam mengeluarkan gagasan-gagasan dan menciptakan ide-ide yang inovatif. Hal ini menjadi sangat penting guna menjawab tantangan yang dihadapi pada era saat ini karena apabila ASN memiliki ide-ide yang inovatif dan ditambah dengan semangat bersinergi maka akan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, daerah tidak boleh alergi dengan perubahan yang serba digitalisasi sebagai wujud dari kemajuan iptek dan inovasi. Kemudian, Wanda juga menambahkan, agar dalam forum Bimtek tersebut dapat dirancang ide "One SKPD, One Innovation" dengan maksud agar ada inovasi setiap OPD dalam setiap tahunnya

sehingga akan tercipta 35 (tiga puluh lima) inovasi.

Bimtek Inovasi Daerah ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan Pelatihan Penginputan Indeks Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Hasil yang cukup menggembirakan telah diperoleh dari pelatihan tersebut, yaitu diperolehnya predikat inovatif untuk Provinsi Papua dan 8 (delapan) Kabupaten/Kota dan 7 (tujuh) Kabupaten memperoleh predikat kurang inovatif. Sedangkan 14 (empat belas) Kabupaten lainnya tidak dapat dinilai karena tidak memberikan data inovasi daerah ke Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga yang berwenang memberikan penilaian indeks inovasi daerah.



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI PAPUA: UPAYA MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAN GIZI



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

Jayapura - RAD-PG merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang tertuang dalam RPJMN Periode 2022-2024. Kegiatan ini merupakan salah satu program nasional yang dikoordinir oleh Bappenas di tingkat pusat dan Bappeda Provinsi di tingkat daerah. Dengan demikian, Bappeda sebagai koordinator wajib menyusun suatu dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi daerah dalam mengentaskan masalah terkait pemenuhan kebutuhan pangan di level paling rendah (keluarga), yang pada akhirnya berdampak pada pemenuhan pangan di lingkup Provinsi sehingga kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dapat terpenuhi.

Bertempat di Hotel Swis bell Jayapura (14/9/22), telah dilaksanakan Konsultasi Publik RAD-PG Provinsi Papua. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Plh. Asisten III Bidang Umum Setda Provinsi Papua, Derek Hegemur. Dalam sambutan pembukaannya, Hegemur menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan yang berkelanjutan serta meningkatkan status gizi masyarakat di Provinsi Papua maka perlu dibuat suatu perencanaan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan untuk waktu kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dibuat dokumen perencanaan ketahanan pangan dan gizi yang merupakan kebutuhan mendesak agar Provinsi Papua tidak mengalami kekurangan pangan serta mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hegemur mengatakan bahwa ketahanan pangan dan gizi merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia yang berkualitas dan berdayasaing di Indonesia dan juga di Provinsi Papua, percepatan penurunan stunting hingga pengentasan

kemiskinan. Saat ini, ketahanan pangan tidak hanya menyangkut sektor pangan dan gizi saja, sehingga dibutuhkan keterlibatan sektor lain dan peran serta dari multisektor yang berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari SKPD di Provinsi Papua dan Mitra Pembangunan. Selain itu, Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Papua dan Papua Barat serta Tim Asistensi dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan Badan Ketahanan Pangan Nasional hadir secara daring.

Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Papua dan Papua Barat, Aminudin Mohammad Ramdan, mengatakan bahwa pihaknya telah mendampingi Bappeda Provinsi Papua dalam pembentukan RAD-PG ini sejak awal penyusunan, pelaksanaan konsultasi publik, hingga penyempurnaan dokumen. Hasil akhirnya akan dituangkan dalam Keputusan Gubernur Papua atau peraturan daerah, yang akan digunakan sebagai rujukan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RAD-PG dari masing-masing Kabupaten/Kota tersebut.

Pelaksana tugas Kepala Bidang Perekonomian, Syahrudin, pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa saat ini tahapannya telah sampai pada penyusunan dokumen dan melakukan koordinasi di level Pemerintah dengan melibatkan beberapa elemen masyarakat untuk melihat hasil dari yang telah dilakukan oleh tim penyusun serta melibatkan juga Mitra Pembangunan (UNICEF) untuk memverifikasi data yang disiapkan oleh SKPD terkait. Konsultasi publik ini dilaksanakan guna penyempurnaan dokumen. Selanjutnya, Bappeda sebagai leading sektor akan mengkonfirmasi kembali terkait validitas dari data-data tersebut. Setelah itu, akan disusun arah kebijakan pembangunan yang akan digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan RPJMD di masa yang akan datang.

RAPAT KOORDINASI PAPUA INTEGRASI SATU DATA (PAITUA) PROVINSI PAPUA



Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan maka dibutuhkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan maka dibutuhkan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah. Adapun perbaikan tata kelola data tersebut diselenggarakan melalui penyelenggaraan Indonesia Satu Data, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam rangka mendukung program nasional, maka untuk Provinsi Papua telah diterbitkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan Papua Integrasi Satu Data (PAITUA) guna mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah berbasis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Masih terkait dengan pelaksanaan PAITUA, maka bertempat di Hotel Aston Jayapura (9/9/22) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi PAITUA Provinsi Papua yang dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Triwarno Purnomo. Dalam sambutannya, Purnomo menyatakan bahwa ketersediaan data memiliki peran yang sangat penting sebagai basis data pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua karena data yang akurat dapat menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan Provinsi tersebut serta yang paling urgent adalah terkait data Orang Asli Papua (OAP) yang merupakan salah satu indikator dalam penghitungan dan pembagian dana Otonomi Khusus di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, dengan Rakor PAITUA ini diharapkan dapat tercipta komunikasi yang interaktif sehingga dapat menyampaikan pertanyaan, saran, masukan, dan berbagai pengalaman dalam mewujudkan satu data di daerah. "Seperti yang kita ketahui dan pahami, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang merupakan kebijakan tata kelola Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan daerah. Untuk merespon Satu Data Indonesia maka Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Papua Integrasi Satu Data dengan maksud untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan akuntabel dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah berbasis data elektronik", lanjut Purnomo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Data dan Analisa Pembangunan (Pusdalisbang) Provinsi Papua, Andry, menyampaikan bahwa kegiatan Rakor PAITUA yang dihadiri oleh peserta dari SKPD Provinsi Papua, Bappeda Kabupaten/Kota, Diskominfo Kabupaten/Kota, BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten/Kota, Wali Data Pendukung SKPD, dan Mitra Pembangunan (UNICEF, KOMPAK, KOLABORASI, dan GGI NETWORK) diperlukan untuk memperkuat kelembagaan PAITUA karena data-data yang dibutuhkan dalam mendukung perencanaan pembangunan di Provinsi Papua akan menjadi semakin baik dan berkualitas. Lebih jauh, Andry berharap agar

dengan adanya Rakor PAITUA ini maka masing-masing Kabupaten/Kota dapat membangun dan menyiapkan kelembagaan dengan mendirikan Forum Satu Data serta melakukan peningkatan kapasitas ditingkat Kabupaten/Kota.

Rakor PAITUA Provinsi Papua bertujuan agar seluruh peserta mendapat pemahaman tentang data dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, sinergitas, dan kolaborasi Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota. Selain itu, hasil akhir dari kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen dalam memajukan data yang berkualitas bagi proses perencanaan pembangunan daerah. Ketua

Panitia, Merlina Hamadi, menjelaskan bahwa capaian dari kegiatan ini adalah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memastikan terbentuknya Forum Data di tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama-sama menyepakati daftar data prioritas, memahami pengolahan informasi pembangunan PAITUA secara menyeluruh, dan memahami teknik pengolahan PAITUA.



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

Jayapura - Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk melihat ketercapaian tujuan pembangunan dengan cara melihat proses dan progress pembangunan tersebut karena dengan melakukan monitoring dan evaluasi maka akan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan serta untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target. Hal yang dilakukan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah mengkaji kesesuaian dengan rencana dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga dapat dicari solusinya, melakukan penilaian terkait ketepatan pola dan manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan, melihat kaitan antara kegiatan dengan tujuannya untuk memperoleh ukuran kemajuan, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan.

Manfaat dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi penanggungjawab kegiatan adalah sebagai salah satu fungsi manajemen atau pengendalian berupa bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kerja, untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan, membantu penentuan langkah-langkah yang berkaitan dengan kegiatan selanjutnya, sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya. Sedangkan manfaatnya bagi pengelola kegiatan adalah sebagai alat bantu untuk mempersiapkan laporan dalam waktu yang singkat, mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki dan

menjaga kinerja yang sudah baik, dan menjadi dasar/informasi yang penting untuk melakukan evaluasi kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahun 2022 diawali dengan melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan tersebut, kemudian pelaksanaan kegiatan administrasi, dan selanjutnya melaporkan hasil monitoring yang dilakukan secara berjenjang kepada penanggungjawab program. Dalam aktivitasnya, dengan menggali data dan informasi yang berkaitan dengan analisis ketercapaian kinerja program yang kemudian dibandingkan dengan rencana program, indikator kunci (ukuran hasil) dan target yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi masalah dan upaya pemecahannya dalam pelaksanaan program. Selain itu, tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan monitoring, yaitu menentukan tujuan, menentukan target/kelompok sasaran, menentukan perencanaan kerja, menentukan kriteria monitoring dan evaluasi yang digunakan, mengumpulkan data, menganalisis data, serta yang terakhir membuat kesimpulan dan rekomendasi.

Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, Simon Kaigere, menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen pemantauan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, yaitu



Kasub Bid Monitoring dan Evaluasi,
Simon P. Kaigere, SE., MM

memantau perkembangan realisasi penyerapan anggaran, memantau realisasi pencapaian target keluaran (output), serta memantau kendala yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Selanjutnya, Kaigere juga menjelaskan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dalam beberapa tahapan. monitoring meja dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu Tahap I dilaksanakan pada 14-15 Juni 2022 dan Tahap II dilaksanakan pada 19 Oktober 2022. Selanjutnya dilakukan monitoring lapangan untuk melihat secara langsung kesesuaian antara rencana dan fakta di lapangan (mensinkronkan data hasil Monitoring Meja dan Monitoring Lapangan). Monitoring Lapangan juga dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu Tahap I dilaksanakan pada Juli – Agustus 2022 dan Tahap II dilaksanakan pada November 2022. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen monitoring lapangan dan dokumen monitoring meja sebagai bahan evaluasi kinerja program selanjutnya.

Tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan monitoring adalah melakukan evaluasi yang bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, dapat menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya.



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

KAMPUNG MANDIRI PANGAN: PERCEPATAN DAN PENGUATAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS KOMODITI LOKAL

Jayapura - Arah kebijakan pembangunan ekonomi terkait percepatan dan penguatan perekonomian daerah berbasis komoditi lokal di 5 (lima) wilayah pembangunan merujuk pada misi keempat “Perekonomian daerah serta pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan lokal dan kultural” dan tujuan pertama dari misi keempat “Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan”. Mengingat pada saat ini sekitar 73 persen Orang Asli Papua bekerja di sektor pertanian maka arah kebijakan pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat hendak diarahkan pada pembentukan kampung mandiri pangan.

Tujuan jangka pendek dari pembentukan kampung mandiri pangan adalah penguatan ketahanan pangan keluarga serta penguatan ketahanan pangan daerah itu sendiri dan juga daerah disekitarnya. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah perubahan nilai produk. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi Papua, Syahrudin, menjelaskan bahwa sebagaimana arahan dari Kepala Bappeda Provinsi Papua, maka pembentukan kampung mandiri pangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 harus diarahkan sesuai dengan tujuan 2 (dua) dalam RPJMD sebagai sasarannya, yaitu pembangunan perekonomian daerah yang inklusif, pemberdayaan masyarakat terutama untuk pengembangan ekonomi masyarakat lokal, penguatan ketahanan pangan daerah, dan penguatan ketahanan pangan keluarga.

Lebih jauh, Syahrudin menjelaskan bahwa pembentukan kampung mandiri pangan ini merupakan terobosan yang bekerja dalam perspektif HITS (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial) sehingga dibutuhkan adanya koordinasi, kolaborasi dan kerjasama dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga harus tetap berpedoman pada Cakram Ekonomi (Campuran Kegiatan dan Program Ekonomi) yang telah dibuat dan menjadi pedoman bagi Bappeda dalam menyusun kegiatan prioritas setiap tahunnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga sebagai pedoman bagi SKPD dalam menterjemahkan kegiatan prioritas Bappeda dalam e-planning. Dengan demikian, setiap SKPD yang terlibat dapat menyusun kegiatan sesuai dengan kewenangannya dalam mendukung pelaksanaan kampung mandiri pangan.



Pelaksana Tugas Kabid Perekonomian,
Syahrudin, SE., M.Si

Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

Pada tahap awal ini, pembentukan kampung mandiri pangan akan dilaksanakan di 2 (dua) lokasi, yaitu Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dan Kampung Noagalo Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya sebagai *pilot project*. Adapun alasan menetapkan Kampung Yokiwa sebagai lokasi *pilot project* karena menindaklanjuti arahan Wakil Gubernur Papua pada tahun 2019 tentang penetapan Kampung Yokiwa sebagai kampung mandiri Otsus (Otonomi Khusus). Kala itu, semua SKPD terkait dihimbau untuk mendata potensi sumberdaya alam yang ada di Kampung Yokiwa sehingga nantinya potensi sumber daya tersebut dapat dikelola untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat. Sedangkan, alasan untuk menetapkan Kampung Noagalo adalah karena pertimbangan akses yang lebih dekat ke Wamena dan berada pada jalur trans Papua sehingga memudahkan dalam pemasaran hasil produksi dan pertimbangan biaya produksi yang lebih murah.



Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur, Kab Jayapura
Foto - Detik Travel

Secara umum, karena ini sifatnya masih pilot project sehingga penetapan lokasi berdasarkan biaya yang rendah dan hasilnya lebih cepat terlihat. “Pelaksanaan kampung mandiri pangan akan berjalan pada tahun 2023. Bidang ekonomi telah mengarahkan semua SKPD di sektor ekonomi untuk melakukan kegiatan-kegiatan strategis pada kedua lokasi tersebut dan aktifitasnya telah tergambar dalam Rencana Kerja (Renja) semua SKPD di sektor ekonomi. Secara umum, mengarahkan kegiatan yang prioritasnya berhubungan dengan perluasan lahan sesuai dengan komoditas unggulan di kedua lokasi tersebut. Misalnya, untuk Yokiwa salah satu fokusnya pada tanaman coklat dan peternakan serta di Noagalo pada tanaman ubi jalar, tanaman

hortikultura, buah naga, dan padi. Sementara itu, Dinas Perikanan Provinsi Papua melalui anggaran perubahan di tahun 2022 ini akan mengadakan penyediaan *biofloc* di Kampung Noagalo Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya untuk mendukung konsep kampung mandiri di wilayah pembangunan Lapago”, ujar Syahrudin. Pada akhir wawancara, Syahrudin berharap adanya dukungan, keterlibatan dan kerjasama dari SKPD lainnya di luar sektor ekonomi, misalnya infrastruktur, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga pelaksanaan kampung mandiri pangan ini dapat berjalan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

Penyediaan bibit ikan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Papua dalam rangka percepatan pembangunan kampung mandiri di Noagalo sebagai bagian dari pelaksanaan program terintegrasi kampung mandiri ekonomi.

WORKSHOP PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

Jayapura - Sumberdaya air merupakan salah satu sumberdaya alam yang vital bagi kehidupan flora dan fauna maupun manusia, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari diberbagai sektor kehidupan. Sebagai salah satu sumberdaya alam maka kegiatan pengelolaan sumberdaya air menjadi sangat penting agar yang membutuhkan air dapat memperoleh akses yang baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama untuk air minum.

Provinsi Papua memiliki 64 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total panjang sungai 35.924,737 km dan total luas daerah tangkapan 572.753,823 km². Banyaknya jumlah DAS menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki kekayaan sumberdaya air yang berlimpah, selain sebagai sumber air baku untuk dasar kebutuhan air bersih, juga dapat menjadi salah satu sumber energi untuk pertanian. Dengan demikian, pengelolaan sumberdaya air perlu dilakukan secara tepat sehingga dapat terjamin berkelanjutan SDA dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Sungai-sungai besar yang terbentang dan danau yang tersebar di Papua dapat menjadi sumber energi terbarukan yang dapat dijadikan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi produktif, pendapatan asli daerah, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Selanjutnya, bertempat di Hotel MaxOne Jayapura (2/12/2022) telah dilaksanakan kegiatan Workshop Perencanaan Sumber Daya Air, yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Papua Verra, A. P. Wanda. Dalam sambutannya, Wanda, menyatakan bahwa

pembangunan sumberdaya air ini harus dimulai dengan proses perencanaan, antara lain dengan melakukan inventarisasi potensi, kondisi, serta kualitas dari sumber daya air secara optimal dan juga dengan melakukan koordinasi antar sektor dan *stakeholder*. Penerapan *good governance* melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya air harus diterapkan secara konsisten. Pengaturan sumberdaya air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak atas air serta menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar dapat memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat karena air bersih selain untuk mendukung kebutuhan rumah tangga dan kegiatan industri juga sangat diperlukan untuk mendukung kesehatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia.



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

Lebih jauh, Wanda juga menjelaskan bahwa bidang sumber daya air mendukung berbagai sektor pembangunan. Bukan hanya pada penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi, tetapi juga kebutuhan pada sektor pertanian, perhubungan, kehutanan, dan lingkungan hidup bahkan sampai dengan perlindungan masyarakat terhadap bencana, baik itu banjir, longsor maupun abrasi pantai. Namun pada kenyataannya, sektor ini tidak menjadi perhatian atau unggul dalam perencanaan dan penganggaran yang tercermin dalam penetapan alokasi-alokasi anggaran yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi penting karena permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidakantisipasi. Identifikasi permasalahan penting untuk dilakukan karena merupakan basis dalam merumuskan isu strategis. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi

berbagi sektor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Wanda berharap agar dari kegiatan Workshop Perencanaan Sumber Daya Air akan terjadi peningkatan tupoksi urusan pekerjaan umum dan sub urusan serta perhatian terhadap kewajiban daerah dalam memenuhi SPM, memahami tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan sehingga terwujudnya sinkronisasi, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar sektor terkait untuk mencapai tujuan besar dari pembangunan daerah.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, Kepala Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Provinsi Papua, Bappeda Provinsi Papua, Dinas PUPRPKP, Lembaga Swasta, BUMD, dan perwakilan Kabupaten/Kota hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini.



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

PEMBENTUKAN 3 PROVINSI BARU DI PAPUA



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

Jayapura - Kamis (30/6/22), DPR telah mengesahkan 3 (tiga) Undang-undang terkait pemekaran Provinsi Papua, yaitu pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Adapun pembentukan 3 (tiga) Provinsi baru tersebut dengan mempertimbangkan bahwa pemekaran wilayah di Provinsi Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua. Selain itu juga, dinilai sebagai salah satu upaya dalam menata daerah dan merupakan solusi dalam memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga dapat mengotimalkan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip *good governance* guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, atas nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada Jumat (11/11/22). Dengan demikian, sejak saat itu resmi Indonesia telah memiliki 37 Provinsi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, maka wilayah Provinsi Papua Selatan meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Adapun ibukota Provinsi Papua Selatan adalah Kabupaten Merauke. Selanjutnya, batas wilayah Provinsi Papua Selatan di sebelah utara adalah Kabupaten Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang; sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini; sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura; dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mimika dan Laut Aru.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah menyatakan bahwa wilayah Provinsi Papua Tengah terdiri dari Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai. Batas wilayah Provinsi Papua Tengah di sebelah utara adalah Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Teluk Cenderawasih; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, dan Asmat; sebelah selatan berbatasan dengan Laut Aru; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kaimana dan Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Ibukota dari Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan menyatakan bahwa ibukota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya dan wilayahnya mencakup Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga. Adapun batas wilayah Provinsi Papua Pegunungan yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Sarmi, dan Keerom; sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Asmat; serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, dan Mimika.

Amanat dari ketiga Undang-undang pembentukan DOB tersebut bahwa sebelum adanya Gubernur dan Wakil Gubernur definitif maka Presiden akan mengangkat Penjabat Gubernur. Dengan demikian, bertepatan dengan peresmian ketiga Provinsi baru tersebut pada (11/11/22), maka Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, juga

melantik Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Apolo Safanpo, sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan; Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Ribka Haluk, sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah; dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Nikolaus Kondomo, sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

Para Penjabat Gubernur yang telah dilantik memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembentukan dan pengisian perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPR, sekretariat MRP, dinas daerah, badan daerah, serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kekhususan, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Penjabat Gubernur juga berkewajiban untuk memfasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), memfasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta DPR untuk pertama kalinya, serta melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

SELAMAT DATANG TIGA PROVINSI BARU TANAH PAPUA

Hariman Darif*)

Jayapura - Akhirnya, perjuangan yang melelahkan itu, kini telah membuahkan hasil. Mengutip cerita para insiator Provinsi Papua Selatan misalnya, perjuangan panjang itu berlangsung kurang lebih 20 tahunan. Tentu demikian juga dua Provinsi lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan tujuan menghadirkan pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara Pusat dan Daerah. Tentu saja dalam Pemekaran Provinsi Papua tujuan dimaksud pastinya menjadi sasarannya. Meskipun selalu diperdebatkan, karena dalam kasus pemekaran Provinsi lebih disebabkan pada kepentingan pragmatis serta strategis, dengan fokus memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban serta usaha (*effort*) percepatan pembangunannya, (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021).

Provinsi Papua Tengah terdiri dari Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deyai, Paniai, Mimika, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Bentang alamnya dicirikan perpaduan wilayah pesisir, rawa-rawa, (Nabire dan Mimika), lembah, danau (Paniai, Deyai, Dogiyai) hingga kaki bukit dan pegunungan (Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya). Dalam klasterisasi wilayah adat, wilayah ini sebagian besar masuk wilayah adat Mee Pago. Masuknya Puncak Jaya dan Puncak ke dalam rumpun provinsi ini disebabkan dua wilayah tersebut bagian dari pemekaran Kabupaten Paniai sebelumnya. Suku yang dominan mendiami provinsi ini adalah suku Amungme, Damal, Dani, Komoro, dan Moni. Wilayah yang cukup berkembang bila diukur dari indikator IPM (2021) yakni Kabupaten Mimika dengan IPM 74,48. IPM terendah Kabupaten Puncak yakni 43,17. Keseluruhan IPM di wilayah ini rata-rata 55,62, pada klasifikasi rendah. Sementara itu wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi Kabupaten Intan Jaya 41,66 persen. Keseluruhan rata-rata kemiskinan di wilayah ini 32,14 persen. Potensi di wilayah ini sesuai kondisi agroklimatologinya semenjak dahulu dari jenis kopi. Jika kemampuan ekonomi dipotret dari jumlah pendapatan daerah, menurut laporan evaluasi APBD 2022 keseluruhannya berkisar Rp 12 triliun. Namun jika ditilik dari *share* Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja maka hanya berkisar Rp 1,774 triliun. *Share* terbesar disumbangkan oleh Kabupaten Mimika berkisar Rp 1,6 triliun. Jumlah penduduk dan luas wilayahnya berkisar 1.211.712,0 jiwa dan 67.625,60 km² (Depdagri, 2020).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, wilayah Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Lany Jaya, Yalimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, Mambramo Tengah, Yahukimo dan Nduga. Corak khas wilayah ini dicirikan daerah lembah berada di pinggiran sungai sampai kaki gunung dan pegunungan. Keseluruhan wilayahnya merupakan pemekaran Kabupaten Jayawijaya, bagian dari wilayah adat Lapago. Dominan suku didalamnya yakni suku Yali, Lany, Nduga dan Dani, serta beberapa suku lainnya di wilayah Pegunungan Bintang. Menurut BPS Provinsi Papua, angka IPM tertinggi tahun 2021 adalah Kabupaten Jayawijaya sebesar 58,67 dan yang terendah adalah Nduga sebesar 32,84. Keseluruhan IPM rata-rata 47,86 atau kategori sangat rendah.

Angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Lany Jaya sebesar 38,73 persen. Namun angka rata-rata kemiskinan di wilayah ini sebesar 35,46 persen. Mata pencaharian asli masyarakatnya sejak dahulu adalah menanam ubi-ubian dan beternak babi. Potensi di wilayah ini berupa tanaman keras dari jenis kopi, tanaman hortikultural berupa sayuran dan juga pariwisata seperti Festival Lembah Baliem. Wilayah ini mulai terbuka dengan dunia luar diawali oleh beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Tersebut diantaranya Hendrikus A. Lorentz, yang diabadikan namanya, untuk menyebut salah satu Taman Nasional yang mashyur di dunia (Taman Nasional Lorentz). Dalam Laporan Tim Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Tahun 2022 menyebutkan bahwa jumlah pendapatan keseluruhan Kabupaten/Kota di wilayah ini sebesar Rp 10,553 miliar, *share*

PAD terbesar dari Kabupaten Lany Jaya. Luas keseluruhan wilayah ini sebesar 52,396,79 km², dan dengan jumlah penduduknya sebesar 1.209.064 jiwa, (Depdagri, 2020).

Wilayah Provinsi Papua Selatan yang pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022, didominasi oleh daerah pesisir, rawa-rawa dan dataran rendah. Kabupaten Asmat dan Merauke tepat berada di tepian laut Arafura, sedangkan Mappi dan Boven Digoel meskipun berada pada daerah ketinggian tetapi wilayahnya banyak diselaputi perairan dari Sungai Digoel dan Maro. Ragam suku yang mendiami wilayah ini terdiri dari suku Asmat, Kombay, Muyu, dan Marind.

Terdapat satu suku yang masih nomaden dan tinggal di pohon-pohon yakni suku Koroway. Mata pencaharian masyarakat tradisionalnya adalah meramu, berburu, dan berkebun. Potensi di wilayah ini semenjak dahulu berasal dari tanaman padi, karet, dan juga obyek wisata Taman Nasional Musamus. BPS Provinsi Papua di tahun 2021 melaporkan bahwa IPM tertinggi di wilayah ini adalah Kabupaten Merauke sebesar 70,49. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Asmat sebesar

51,29. IPM keseluruhannya rata-rata sebesar 60,52 atau berada pada kategori sedang. Wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Mappi sebesar 26,05 persen. Sedangkan rata-rata keseluruhannya sebesar 20,23 persen. Dalam evaluasi APBD induk tahun 2022 disebutkan bahwa jumlah pendapatan daerah di wilayah ini berkisar Rp 6 triliun. Namun *share* dari PAD hanya sebesar Rp 251 miliar. Jumlah penduduk dan luas wilayahnya yaitu 510.632,00 jiwa dan 135.535,70 km².



Dari pendekatan wilayah adat ke pendekatan ekosistem, secara keseluruhan bentang alam di wilayah-wilayah tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua belahan besar, yakni wilayah mudah akses dan sulit akses. Di wilayah mudah akses, persoalan pembangunan sedikit tidak menjadi permasalahan namun di wilayah yang sulit akses, disinilah yang harus diperhatikan dalam pembangunan ekonomi Papua di wilayah - wilayah pemekaran yang baru. Selain itu, persoalan ketimpangan wilayah, ketimpangan IPM wilayah Papua Tengah ini sebesar 31,31 persen, wilayah Papua Pegunungan 25,83 persen, dan Papua Selatan sebesar 11,79 persen. Demikian pula dengan kemiskinan, kurangnya kapasitas fiskal dengan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang kecil, memerlukan terobosan strategi yang mumpuni agar bisa keluar dari stigma-stigma negatif. Jika selama ini pendekatan pembangunan Papua dilakukan dengan pendekatan wilayah adat, maka mestinya dilakukan perubahan, sekedar menguatkan atau mencoba pendekatan lain. Untuk itu, penulis mengingatkan kembali pendekatan Lavalin dalam mendeskripsikan bentang alam Papua. Diharapkan pendekatan pembangunan Papua dapat lebih fokus memotret permasalahan dalam tingkat spasial yang lebih kecil sehingga menjadi tepat sasaran. Didalam tulisan tersebut Tanah Papua dideskripsikan terdiri atas beberapa geomorfologi. Ekosistem Papua pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Haynes kemudian mengusulkan agar dataran rendah dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu pantai, rawa dan sungai; dataran pantai; serta kaki gunung dan lembah

kecil. Mengutip dari Sumule, ahli lain mengusulkan agar ekosistem dataran tinggi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu lembah luas, dataran di sekitar danau, dan lereng bukit di lembah sempit. Dengan pembagian seperti ini maka berhasil diidentifikasi 6 (enam) sub-sub ekosistem Papua yang kemudian di masing-masing sub-sub ekosistem itu diidentifikasi 4 (empat) faktor penting dalam pembangunan pertanian, yaitu kegiatan produksi utama; makanan pokok dan tambahan; sumber-sumber tradisional pendapatan tunai (*cash income*); serta sumber-sumber pendapatan tunai yang berasal dari luar. Dengan mengkombinasikan 6 (enam) sub-sub ekosistem itu dan 4 (empat) faktor penting pembangunan pertanian maka akan diperoleh suatu matriks yang berisi 24 (dua puluh empat) buah kotak yang berisi informasi yang ringkas namun sangat kaya dan serta dapat membantu parapihak untuk mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan di wilayah sub-sub ekosistem itu. Misalnya, kegiatan produksi utama di sub-sub ekosistem pantai, rawa dan sungai adalah berburu, mengumpulkan hasil, dan bertanam sagu. Makanan pokok dan tambahan mereka adalah sagu, ikan, dan sejumlah kecil daging buruan. Jadi, ketika pemerintah lalai memperhitungkan karakteristik produksi utama dari manusia Papua yang bermukim di sub-sub ekosistem ini dan memberdayakan potensi yang mereka miliki, maka kita tidak usah heran ketika terjadi kejadian rawan pangan seperti di Asmat dan Lany Jaya yang selalu mengancam setiap tahun. Singkatnya, dengan mencoba selain sosial budaya, seperti dengan

mengenali geografi, demografi, potensi bentang alamnya yang lebih dalam, mungkin menjadi bahan yang detail dan tajam dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam membangun wilayah-wilayah tersebut ke depan. Citra positif dari pemekaran Provinsi Papua, terlepas dari kesan angka-angka negatif yang ditampilkan dalam uraian diatas, maka ada setitik harapan yang bisa menjadi oase dalam membangun Papua ke depan. Paling tidak, stigma Papua yang identik dengan urutan terendah sedikit bisa keluar. Hadirnya pemekaran ini, melambungkan angka IPM Provinsi Papua (induk) menjadi 66,96. Meskipun masih kategori sedang tetapi sudah beranjak ke urutan 29 diatas saudara tuanya, Provinsi Papua Barat, dari 37 Provinsi se-Indonesia, atau mulai menapaki papan tengah. Sayang sekali status ini tidak diikuti perbaikan tingkat kemiskinan yang masih pada angka 22,27 persen, sedikit lebih baik dari Provinsi Papua Barat. Maka pekerjaan rumah yang paling besar melalui pemekaran wilayah ini, tentu adalah mari kita “membagi kemiskinan” kepada semua daerah, dan bergandeng tangan berusaha mengentaskannya. Semoga!.

*)Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Pusat Data dan Analisa Pembangunan Bappeda Provinsi Papua

SERBA - SERBI KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 2022



Pembahasan Paparan RKPd Provinsi Papua Tahun 2023



Persiapan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Tahun 2022



Asistensi Musrenbang Kabupaten Tahun 2022

SERBA - SERBI KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 2022



Musrenbang Otsus & Musrenbangda Provinsi Papua Tahun 2022



**Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Provinsi Papua & Papua Barat
Dalam Penerapan Tata Kelola Otsus**



Bimtek Manajemen Inovasi Daerah Tematik Urusan Pemerintahan Daerah 2022

SERBA - SERBI KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 2022



Rapat Terkait Papua Integrasi Satu Data (Paitua)



Monitoring Meja APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022



Bimtek Pengalokasian Dana Otonomi Khusus dan DTI 2022



Rakor Pembinaan Hubungan Pusat & Daerah Dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri

SERBA - SERBI KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 2022



**Sosialisasi Permendagri No.81 Tahun 2022 Tentang Penyusunan
RKPD Tahun 2023**



**Sosialisasi PERGUB No. 50 Tahun 2021 Tentang Papua Integrasi Satu Data
dan Profil Pembangunan Papua**



Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Pokja PKP Provinsi Papua



Rapat Konsolidasi Data SDA Pada WS Wapoga-Mimika



SERBA - SERBI KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 2022



Asesmen dan Kunjungan Lapangan Ujicoba Implementasi Pedoman Umum Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Provinsi Papua



Sosialisasi Permenpan RB No.8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS



Rapat Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dengan SKPD Terkait



Evaluasi Penyerapan Anggaran APBN Tahun 2022

SERBA - SERBI KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 2022



Monitoring Web PPID Bappeda Bersama Sekda Provinsi Papua



Rapat Integrasi Layering Dapodik



**Pelaksanaan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan dan Potensi Integrasi
SEPAKAT Desa/Kelurahan dengan SAIK+/SIO**



Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

SERBA - SERBI KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 2022



Konsultasi Publik Renaksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Papua



FGD Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Papua



Monitoring Meja Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022



FGD Evaluasi Rencana Anggaran Program Penggunaan Penerimaan Dana Otsus

SERBA - SERBI KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 2022



Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Papua



Penyampaian Isu dan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Papua Pasca Pelaksanaan DOB



Rakor PAITUA Provinsi Papua



Pertemuan Dalam Rangka Penyerahan Hasil Asistensi
Penyusunan Dokrenda 3 Provinsi DOB

SERBA - SERBI KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 2022



Seminar Akhir Isu Dampak Lingkungan Hidup di Lima Wilayah Adat Provinsi Papua



Workshop Perencanaan Sumber Daya Air



FGD Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2023-2024

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA 2022

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI PAPUA



2016, 58,05	2020, 60,44
2017, 59,09	2021, 60,62
2018, 60,06	2022, 61,39
2019, 60,84	

Sumber: BPS

PENDAPATAN PER KAPITA DI PROVINSI PAPUA

(RIBU RP)

2016, 54,00
2017, 57,86
2018, 63,38
2019, 56,07
2020, 57,90
2021, 54,03



Sumber: BPS



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI PAPUA (%)

2014, 3,48	2017, 3,96	2020, 4,28	2022, 2,83
2015, 3,72	2018, 2,91	2021, 3,33	
2016, 2,97	2019, 3,51		

Kondisi Agustus
Sumber: BPS



PERTUMBUHAN EKONOMI

DI PROVINSI PAPUA (DENGAN TAMBANG)

2014, 3,65%	2018, 7,37%
2015, 7,35%	2019, -15,74%
2016, 9,14%	2020, 2,39%
2017, 4,64%	2021, 15,11%

Sumber: BPS

TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA (%)

2014, 27,80	2017, 27,76	2020, 26,64
2015, 28,40	2018, 27,74	2021, 26,86
2016, 28,40	2019, 27,53	2022, 26,56

Sumber : BPS
Kondisi Maret

TINGKAT INFLASI DI PROVINSI PAPUA (%)

2014, 7,98	2017, 2,41	2020, 1,02
2015, 2,79	2018, 6,70	2021*, -0,42
2016, 4,13	2019, 0,60	2022*, -0,18

Sumber: BPS *) Kondisi Agustus 2022



PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT (GINI RATIO) DI PROVINSI PAPUA

2014, 0,41	2017, 0,39	2020, 0,39
2015, 0,42	2018, 0,37	2021, 0,39
2016, 0,39	2019, 0,36	2022, 0,40

Sumber: BPS

ANGKA HARAPAN HIDUP (TAHUN)

2014, 64,84	2017, 65,14	2020, 65,79
2015, 65,09	2018, 65,36	2021, 65,93
2016, 65,12	2019, 65,65	2022, 66,23

Sumber: BPS

Jumlah Guru dan Murid Tahun 2022

*di Bawah Kemendikbud



Sumber: Dapodikdasmen



Jumlah Sekolah di Provinsi Papua

*di Bawah Kemendikbud



Sumber: Data Sekolah Nasional - Dapodikdasmen

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Papua 2017-2022 (Tahun)



Sumber: BPS



Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Papua 2017-2022 (Tahun)



Sumber: BPS



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA



PUSDALISBANG
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
Sie. Pelayanan Informasi & Komunikasi